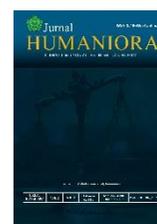


Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
ISSN 2548-9585 (Online)

Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora



Potensi Subsidi Energi dalam Mengurangi Kemiskinan

Yohana Paramita¹, Ainur Rosidah¹, Mei Suryanti¹

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

*Email Korespondensi: yohanaxak5@gmail.com

Diterima 15 Agustus 2020; Disetujui 18 September 2020; Dipublikasi 3 Oktober 2020

Abstract: Energy subsidy policy is the government's efforts to provide affordable energy for the poor. Energy subsidies provide opportunities for poor people to have access to modern energy gives impact on increasing the productivity of the poor. This study is a literature study that aims to determine the potential energy subsidies in reducing poverty. The literature study was conducted by a scientific research article searches via Google Scholar, International Energy Agency, and Research Gate. There are 35 articles on energy subsidies and poverty, after the identification of the 35 articles, only 15 articles compatible with the research. The results showed that the energy subsidy gives impact on the level of the poor, through increased revenues, health and better education. Energy subsidies can provide the optimal impact to decline the number of poor, if there is an oversight and policies that can ensure energy subsidies on target.

Key words: Energy, Energy Subsidy, Poverty

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover secara simultan terhadap Return on Asset. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor kosmetik dan barang keperluan rumah tangga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017 yang berjumlah 6 perusahaan. Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini di tentukan dengan purposive sampling, sehingga untuk penarikan sample dalam penelitian ini berjumlah 5 perusahaan sub sektor kosmetik dan barang keperluan rumah tangga. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset. Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset. Total Asset Turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset. Secara simultan Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan terhadap Return on Asset.

Kata Kunci : Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover, Return on Asset

Energi merupakan komoditas penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Komoditas ini berperan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Penggunaan energi seperti BBM, elpigi, dan listrik sangat penting bagi kegiatan usaha dan rumah tangga. Besarnya kebutuhan energi dalam negeri seringkali

melebihi ketersediannya. Demi memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, pemerintah melakukan kegiatan impor. Biaya produksi energi yang terbilang sangat tinggi menjadikan harga jual energi juga tinggi. Hal ini menyebabkan masyarakat kelas menengah kebawah atau masyarakat miskin akan mengalami

Potensi Subsidi Energi...

(Paramita, Rosidah, & Suryanti, 2020)

kesulitan untuk memperoleh dan memenuhi kebutuhan energi. Agar masyarakat kalangan menengah kebawah dapat menjangkau harga energi, seperti BBM, elpigi, dan listrik maka pemerintah menetapkan kebijakan subsidi energi.

Menurut International Energi Agency (IEA) (2011) subsidi energi merupakan tindakan pemerintah menurunkan harga energi yang dibayar oleh konsumen, menaikkan harga yang diterima oleh produsen atau menurunkan biaya produksi. Dengan adanya subsidi energi, harga bahan bakar minyak (BBM), elpigi, dan listrik menjadi lebih murah. Subsidi konsumsi energi digunakan untuk memastikan bahwa semua konsumen, terutama rumah tangga miskin, memiliki akses ke tingkat konsumsi energi minimum (Saunders dan Schneider, 2000:2). Dengan adanya subsidi energi masyarakat kalangan menengah kebawah atau masyarakat miskin dapat tetap menikmati penggunaan energi yang melimpah dengan harga yang terjangkau dan dapat menjalankan kegiatan ekonomi.

Subsidi energi berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adanya subsidi energi dapat membantu masyarakat miskin untuk memperoleh akses energi. Energi memainkan peran penting dalam memastikan penyaluran layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin, seperti pekerjaan, makanan, layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih dan sanitasi (World Energi Council and FAO, 1999:21). Dimana seperti yang kita ketahui bahwa hampir seluruh kegiatan rumah tangga memerlukan energi, baik berupa bahan bakar maupun listrik. Berdasarkan The World Bank Group Energi Sector Strategy (2010) tujuan subsidi dapat membantu masyarakat miskin dan meningkatkan kesetaraan, mencapai keamanan

energi, mengoreksi eksternalitas, dan mendukung produksi dalam negeri yang terkait dengan pekerjaan.

Saghir (2005:1) menyatakan pengadaan energi memberikan dampak pada masyarakat miskin melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat, dan dapat mengurangi kemiskinan di lain sisi. Dengan adanya subsidi yang membantu masyarakat miskin untuk memperoleh energi, maka akan semakin banyak masyarakat yang mampu menjangkau dan memenuhi kebutuhan energi. Hal ini akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat, sehingga kemiskinan dapat berkurang. Namun seringkali terjadi ketidaktepatan sasaran subsidi. Dimana penikmat subsidi justru kalangan menengah keatas, sehingga subsidi energi tidak memberi dampak yang besar bagi masyarakat miskin. Studi literature ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam peran subsidi energi dalam mengurangi kemiskinan. Dalam studi ini peneliti akan mengkaji 15 jurnal dan artikel empiris yang berkaitan dengan peran subsidi energi, pengaruh subsidi energi terhadap kemiskinan, dan potensi subsidi energi dalam mengurangi kemiskinan.

KAJIAN PUSTAKA

Subsidi

Menurut Oxford Advanced Learners Dictionary (1990) dalam penelitian (Chinyere & Ani Casimir 2013) subsidi adalah: "the money that is paid by a government or organization to reduce the cost of services or of producing goods so that their prices can be kept low". Makna dari kalimat uang yang dibayarkan oleh pemerintah atau organisasi untuk mengurangi biaya layanan atau memproduksi barang sehingga harganya dapat tetap rendah Subsidi pertama kali di implementasikan di Inggris pada abad

10 pada masa kekuasaan Raja Charles II. Setelah itu subsidi baru berkembang pada abad 20 dan banyak program-program subsidi yang bisa memecahkan persoalan pemerintah terutama dalam anggaran keuangan.

Subsidi menurut Todaro dan Smith (2003: 811) adalah ketika pemerintah melakukan sebuah pembayaran kepada produsen ataupun distributor yang berada pada sebuah industri dengan tujuan untuk menjaga kualitas kinerja dalam sebuah industri yang berkaitan agar tidak sampai terjadi penurunan.

Rudi Handoko dan Pandu Patriadi telah mengutip buku yang berjudul *Contemporary Economics* yang ditulis oleh Milton H. Spencer dan Orley M. Amos, Jr dimana telah dijelaskan bahwa subsidi merupakan suatu bentuk pembayaran oleh pemerintah kepada perusahaan produksi yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas suatu produk dengan harga hasil produksi yang lebih murah dan membayar kepada rumah tangga konsumen agar mampu menambah jumlah barang atau jasa yang dibeli dan digunakan.

Menurut Nota Keuangan dan RAPBN 2014, subsidi menjadi salah satu media pengalokasian anggaran yang disalurkan kepada masyarakat melalui perusahaan, lembaga, badan usaha produksi dengan menjualbelikan barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak sehingga masyarakat mampu membeli barang dan jasa yang diproduksi dengan harga yang lebih terjangkau. Menurut Oxford Advanced Learners Dictionary (1990) dalam penelitian (Chinyere & Ani Casimir 2013) subsidi adalah: *“the money that is paid by a government or organization to reduce the cost of services or of producing goods so that their prices can be kept low”*. Subsidi pertama kali di

implementasikan di Inggris pada abad 10 pada masa kekuasaan Raja Charles II. Setelah itu subsidi baru berkembang pada abad 20 dan banyak program-program subsidi yang bisa memecahkan persoalan pemerintah terutama dalam anggaran keuangan.

Subsidi Energi

Menurut Putra dan Aqimuddin (2014:397) subsidi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah berupa bantuan langsung maupun tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak swasta atau perusahaan dengan tujuan untuk menurunkan harga barang dan jasa yang menjadi kepentingan umum. Menurut Pudjanarsa dan Nursuhud (2013:1) energi adalah potensi dalam melakukan sebuah pekerjaan.

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa subsidi energi adalah pengeluaran pemerintah yang berupa bantuan langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan potensi negara yang dibayarkan kepada pihak swasta maupun perusahaan agar dapat melakukan suatu pekerjaan guna menurunkan harga barang dan jasa yang menjadi kepentingan umum.

Faktor yang Mempengaruhi Subsidi Energi

Mulyani (2015) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi subsidi adalah variabel kurs dollar, harga minyak dunia, impor, dan konsumsi minyak subsidi dimana keempat variabel ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap subsidi BBM. Variabel yang mempengaruhi secara langsung dan bersifat dominan terhadap subsidi BBM adalah variabel kurs dollar. Sedangkan variabel yang tidak mempengaruhi secara langsung namun masih bersifat dominan terhadap subsidi BBM adalah variabel konsumsi BBM subsidi melalui adanya kegiatan

impur minyak.

Kemiskinan

Salah satu masalah yang dihadapi Negara berkembang adalah masalah kemiskinan. Seperti halnya di Indonesia. Pengertian kemiskinan menurut Bappenas (2004) ialah sebuah kondisi dimana seorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Sedangkan menurut Ayula Candra Dewi Mulia Sari dalam (Misdawita & Sari, 2013) menjelaskan bahwa secara umum pengertian kemiskinan dapat diklasifikasikan kedalam 5 kelas, yakni yang pertama kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut merupakan sebuah kondisi dimana seseorang benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, papan, pangan, kesehatan dan pendidikan. Kelas kedua adalah kelas kemiskinan relatif, ialah sebuah kondisi dimana seseorang memiliki penghasilan namun tidak lebih besar daripada yang lainnya. Ketiga adalah kelas kemiskinan kultural, kondisi kemiskinan ini terjadi karena prinsip dan sikap seseorang atau sekelompok orang yang tidak mau melakukan usaha untuk memperbaiki taraf kehidupannya meski ada pihak yang bersedia membantu. Yang ke empat adalah kemiskinan kronis, kondisi kemiskinan ini terjadi akibat beberapa hal diluar individu tersebut yang menghambat proses memperbaiki taraf kehidupannya. Hal-hal tersebut diantaranya adalah rendahnya taraf pendidikan, keterbatasan sumberdaya, keterisolasian, rendahnya kualitas kesehatan, kurangnya lapangan pekerjaan. Kelima, adalah kemiskinan sementara. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh adanya perubahan siklus

ekonomisebuah Negara, dari kondisi normal menjadi krisis.

Dari luasnya pengertian kemiskinan, diperlukan hal-hal yang dapat dijadikan ukuran status kemiskinan. Badan Pusat Statistik menggunakan variable pengeluaran per kapita per bulan yang dibandingkan dengan besarnya nilai GK untuk menentukan seseorang dikategorikan miskin atau tidak. Orang yang mempunyai pengeluaran rata-rata per kapita per bulan dibawah GK, dikategorikan penduduk miskin.

Word Bank memberikan standar kemiskinan berdasarkan paritas daya beli (purchase power parity) sebesar USD1 dan USD2 perkapita perhari. Paritas daya beli mengukur seberapa banyak barang yang dapat dibeli dengan sebuah mata uang. Maka dalam hal ini perlu dilakukan konversi nilai mata uang dolar ke rupiah terlebih dahulu.

Faktor yang Menyebabkan Kemiskinan Di Indonesia

Kemiskinan identik dengan ketidak mampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhannya. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Zuhdiyaty & Kaluge, 2018) menunjukkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan diantaranya ialah pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia.

Untuk meringankan beban rakyat dan meningkatkan kesejahteraannya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah pemberian subsidi energi. Hal tersebut dianggap mampu membantu rakyat keluar dari garis kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Muhammad Wahyu Khairi dan Nur Aidar yang menunjukkan bahwa pemberian subsidi energi oleh pemerintah mampu mengurangi kemiskinan (Khairi, 2018)

Namun, hasil penelitian lain (Main, 2013) menunjukkan bahwa dalam jangka pendek pemotongan subsidi BBM terhadap penduduk tidak mampu memiliki dampak yang buruk. Sedangkan dalam jangka panjang pemotongan subsidi BBM memiliki dampak yang baik. Efeknya perekonomian dalam negeri akan lebih stabil dikarenakan anggaran APBN yang ideal, tidak terlalu terbebani subsidi. Oleh karena hal tersebut, perubahan harga minyak dunia tidak mengganggu alokasi pengeluaran yang sudah dianggarkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur yang dilakukan dengan cara menelaah 15 jurnal dan artikel yang berkaitan dengan subsidi energi, peran subsidi energi, kemiskinan, serta peran subsidi energi dalam mengurangi kemiskinan. Hasil telaah literatur tersebut digunakan untuk mengidentifikasi peran subsidi energi, pengaruh subsidi energi terhadap kemiskinan, dan potensi subsidi energi dalam mengurangi kemiskinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Subsidi

Dalam menentukan harga energy, negara Indonesia tidak mengikuti mekanisme pasar, melainkan ditetapkan secara administrative oleh pemerintah. Menurut (Dartanto, 2005) dalam menetapkan harga, pemerintah mempertimbangkan beberapa hal, yakni :

1. Tujuan efisiensi nasional, penetapan harga

memperhatikan jumlah yang dibutuhkan masyarakat dengan kemampuan belinya serta memastikan kecukupan cadangan minyak dengan tujuan di ekspor.

2. Tujuan mobilisasi dana, dalam menetapkan harga pemerintah memaksimalkan pendapatan hasil ekspor energy untuk menutupi biaya pertumbuhan dan pembangunan.
3. Tujuan sosial (pemerataan) : mendorong pemerataan melalui perluasan akses bagi kebutuhan pokok yang bergantung pada energi seperti penerangan, memasak dan transportasi umum, dan
4. Tujuan kelestarian lingkungan: mendorong agar pencemaran lingkungan seminum mungkin sebagai dampak pembakaran sumber-sumber energi.

Dengan mempertimbangkan empat factor diatas diharapkan harga energy yang ditetapkan dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan dengan tetap memberikan keuntungan pendapatan untuk melaksanakan program-program pembangunan.

Adanya subsidi diharapkan mampu mengatasi distorsi pasar yang dimaksudkan agar masyarakat tidak mampu masih bisa membeli bahan kebutuhan pokok dengan harga sesuai dengan pendapatan mereka. Namun, pada realisasinya subsidi ini tidak sesuai target dimana penggunaannya dinilai sakh sasaran selain itu subsidi sering dijadikan permainan komoditas politik.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh (Syahrul, 2015) dalam Katadata.co.id di Indonesia, realisasi total subsidi pada tahun 2014 menjadi jumlah terbesar setelah sepuluh tahun terakhir yakni

mencapai 391 triliun rupiah. Namun, pada tahun 2015 terdapat penurunan secara drastis hingga menjadi 189 triliun rupiah. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pemerintah tahun 2015 yaitu penurunan subsidi BBM, dan tabung Gas LPG 3kg dengan jumlah pemotongan sebesar 190 triliun yang diharapkan dan dinilai mampu menekan dampak fiskal bagi Indonesia. Meskipun kebijakan subsidi ini dinilai tidak mampu memberikan sumbangsih yang cukup berarti terhadap penurunan kemiskinan nasional tapi subsidi BBM terus dicanangkan karena tetap membawa pengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia, meskipun hanya sedikit.

Pengaruh Subsidi Energi Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al (2009) adanya kebijakan subsidi harga BBM dan elpiji (kenaikan subsidi dan subsidi aktual) mengakibatkan GDP riil meningkat yang mendorong adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Hal tersebut disebabkan karena nilai pengeluaran pemerintah yang meningkat tajam jika dibandingkan dengan nilai konsumsi, investasi, dan net ekspor. Kebijakan tersebut peningkatan jumlah konsumsi BBM dan elpiji, karena harga jual yang turun. Kebijakan subsidi harga BBM dan elpiji juga menurunkan tingkat penduduk miskin di masa mendatang.

Di sisi lain, Hedaia, et.al. (2016) melakukan penelitian mengenai dampak pencabutan subsidi energi pada tahun 2014 pada seluruh kelompok pendapatan dan pada kemiskinan di negara Mesir. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penghapusan subsidi energi berdampak pada kenaikan tingkat kemiskinan di negara tersebut.

Salah satu hasil energi yang paling banyak digunakan dan mengalami perubahan harga akibat pengurangan subsidi yang diberikan adalah BBM. Padahal naik turunnya harga BBM akan diikuti oleh naiknya harga barang dan jasa lainnya mengingat BBM merupakan salah satu barang yang pasti digunakan dalam kegiatan ekonomi mulai dari proses produksi, distribusi sampai konsumsi.

Misalnya, di Indonesia menurut BPS pada 2018, inflasi mencapai angka 3,2%, angka ini lebih rendah dari tahun 2017 namun meningkat dari tahun 2016. Sedangkan hal yang memicunya adalah kenaikan harga BBM dengan presentase 0,26% dan angka tersebut merupakan angka terbesar dari kontribusi kenaikan harga barang-barang lain yang mempengaruhi inflasi pada tahun 2018.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa kenaikan harga BBM memiliki pengaruh cukup kuat untuk memicu terjadinya inflasi yang merupakan salah satu factor penyebab kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartanto (2005).

Selain itu, hasil kajian mengenai PKPS BBM Indonesia, kenaikan harga BBM sebesar 29% ini akan membawa dampak yang cukup terasa, baik secara positif maupun negatif. Dampak positif yang dapat dirasakan adalah dengan menurunnya persentase penduduk miskin sebesar 2,8 persen atau sekitar 5 juta orang, sedangkan dampak buruknya adalah meningkatnya nilai inflasi yakni sebesar 0,7-1,2 persen. (Koran Tempo 14 Maret 2005; Ikhsan, et.al., 2005: 25)

Tim Ekonomi INDEF (*Institute for Development of Economics and Finance*) menyebutkan bahwa tidak adanya dampak positif yang diakibatkan adanya kenaikan harga BBM,

inflasi akan mengalami kenaikan sebesar 2,8-3,02 persen dan terjadinya peningkatan penduduk miskin pada tahun 2005 sebesar 18,61 persen atau sekitar 40,4 juta orang dimana hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 1,95 persen dari tahun 2004.

Tabel 6. Hasil Analisis Data

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	38,41860	42,15816	0,0000
Pendidikan	-0,000137	-4,26563	0,0028
Kesehatan	0,000412	2,699265	0,0271
Subsidi	-5,61E-06	-0,767668	0,4647
R ²	0,896852	F-stat 23,18612	
		Prob (F-stat) 0,000267	

Sumber: data diolah Eviews 6.0.

Misdawita dan Sari (2013) dalam uji koefisien regresi menunjukkan bahwa subsidi memiliki nilai probabilitas lebih besar daripada α 5 persen sehingga tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidak efektifan penyaluran subsidi dari pemerintah kepada masyarakat dalam mengurangi angka kemiskinan. Terjadinya hal seperti ini diakibatkan karena lebih banyaknya penggunaan subsidi oleh kalangan masyarakat menengah ke atas yang memiliki fasilitas yang lebih banyak menggunakan produk pelayanan publik daripada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Padahal, tujuan adanya subsidi adalah untuk mengurangi beban masyarakat miskin di berbagai bidang, mulai dari BBM, listrik, dan lain-lain. Jadi, subsidi yang tidak teapt sasaran mengakibatkan pengeluaran subsidi pemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia.

Potensi Subsidi Energi Dalam Mengurangi Kemiskinan

Sebagian besar masyarakat miskin mengalami kesulitan dalam memperoleh akses energi modern

dan bersih. Dari 3 miliar orang, 2,7 miliar orang diantaranya memasak dan menghangatkan rumah mereka dengan bahan bakar tradisional dan kompor rendah efisiensi (UNDP dan WHO, 2009; IEA, 2010a) dan hampir satu setengah miliar tanpa akses listrik (IEA, 2010a). Sulitnya akses ke energi modern dan bersih tentunya berdampak bagi kehidupan masyarakat miskin, karena hampir seluruh kegiatan masyarakat memerlukan adanya energi. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh yaitu penggunaan energi listrik, energi listrik digunakan masyarakat untuk penerangan, mengoperasikan alat-alat rumah tangga, dan mengakses informasi. Dampak yang paling terlihat diantaranya dampak kesehatan dan pendidikan. Misalnya, pemanfaatan bahan bakar berupa kayu bakar yang dapat mengganggu kesehatan pernafasan, dan minimnya penerangan yang dapat mengganggu kegiatan belajar anak. Energi modern dan bersih berkontribusi pada perbaikan dalam kesejahteraan sosial, termasuk meningkatkan pendapatan yang disebabkan adanya peningkatan kesehatan, sanitasi, pendidikan, dan lainnya. Di Bangladesh, penilaian dampak elektrifikasi pedesaan mengungkapkan bahwa 63% dari rumah tangga listrik yang disurvei melaporkan peningkatan pendapatan sebagai akibat langsung dari adanya listrik (Berthaud, et al., 2004).

Menurut Saghir (2005:6) Energi memiliki hubungan erat dengan pengurangan kemiskinan melalui pendapatan, kesehatan, pendidikan, *gender*, dan lingkungan. Dalam hal peningkatan pendapatan, penggunaan energi modern dapat meningkatkan produktivitas masyarakat miskin. Penggunaan bahan bakar minyak dapat mempercepat pergerakan barang antara daerah-daerah terpencil dan pasar, dan dapat memperkuat aktivitas *agricultural* yang mendorong

memperluas produksi tanaman. Listrik memungkinkan rumah tangga miskin untuk terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan mata pencaharian, dengan memberikan pencahayaan dan pengoperasian mesin yang meningkatkan output dan meningkatkan produktivitas usaha kecil dan toko-toko dan kekuatan telekomunikasi.

Renner, Lay, (2015) Berdasarkan parameter dari sistem permintaan rumah tangga terhadap subsidi baik itu berupa BBM, gas elpiji, ataupun listrik, dapat disimulasikan skenario pengurangan subsidi energi untuk beberapa percobaan dilakukannya reformasi subsidi. Hal ini termasuk pemotongan subsidi untuk pemotongan tunggal maupun bersama untuk semua perusahaan atau swasta selaku produsen energi. Dalam hal ini menunjukkan bahwa dampak kesejahteraan tergantung pada besarnya perilaku konsumsi rumah tangga terhadap subsidi dimana sifat subsidi yang tepat, struktur tarif, dan masing-masing perusahaan atau pihak swasta selaku produsen energi bersubsidi. Berbeda dengan temuan sebelumnya dan kebijaksanaan konvensional, hasil dari mengamati pola distribusi progresif hanya untuk kasus pemotongan subsidi bensin sedangkan untuk listrik, LPG dan minyak tanah dampak kesejahteraannya sedikit regresif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Subsidi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemberian bantuan kepada masyarakat agar dapat membeli barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah.

Pelaksanaan subsidi selama ini sudah cukup meringankan beban masyarakat yang kesulitan dalam pemenuhan kebutuhannya akan sumber energi, baik

LPG, BBM, dan sumber energi lainnya. Namun, perubahan besar masih belum dapat dirasakan dengan adanya subsidi ini, masih banyak masyarakat miskin yang belum merasakan haknya dalam menikmati subsidi. Hal ini karena subsidi yang seharusnya digunakan untuk masyarakat kurang mampu atau miskin dalam membantu pemenuhan kebutuhannya di bidang energi tidak sesuai target yang telah direncanakan. Subsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat miskin justru lebih banyak digunakan oleh masyarakat menengah ke atas. Dimana masyarakat menengah ke atas ini memiliki fasilitas yang jumlah yang tidak sedikit dimana fasilitas tersebut memanfaatkan sumber energi yang bersubsidi.

Subsidi energi dapat membawa pengaruh yang besar dalam penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia ketika subsidi energi tersebut dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu masyarakat miskin bukan masyarakat menengah ke atas. Pemerataan subsidi energi akan dapat terlaksana ketika pemerintah mampu membangun keyakinan masyarakat menengah ke atas bahwa subsidi energi dapat mengentaskan kemiskinan nasional jika masyarakat miskinlah yang menggunakan, bukan mereka sebagai kalangan masyarakat menengah ke atas.

Saran

Masyarakat harus memiliki pandangan dan pemikiran yang lebih terbuka mengenai penggunaan subsidi energi baik di bidang LPG, BBM, listrik, dan sumber energi lainnya. Pemerintah telah memberikan subsidi energi untuk masyarakat nasional namun akan lebih efektif jika subsidi energi tersebut digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Sehingga,

masyarakat menengah ke atas lebih baik tidak menggunakan subsidi energi yang terlalu berlebihan dengan tidak terus menambah fasilitas pribadi yang dapat menyedot energi bersubsidi.

Pemerintah bisa menekan ketidaktepatan sasaran subsidi energi dengan membuat kebijakan peningkatan jumlah pajak bagi masyarakat menengah ke atas yang banyak menggunakan fasilitas energi bersubsidi sehingga masyarakat menengah ke atas tidak perlu menggunakan subsidi energi secara berlebihan. Masyarakat menengah ke bawah juga perlu bekerja lebih efektif agar produktivitas semakin meningkat sehingga dapat menambah penggunaan subsidi energi yang tentunya mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dartanto, T. (2005). BBM, Kebijakan Energi, Subsidi, dan Kemiskinan di Indonesia. *Inovasi*, 5/XVII, 11–17. <https://scholar.google.com/citations?user=9uR68UIAAA&hl=en>
- Khairi, M. W. (2018). Pengaruh Subsidi Energi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(3), 359–369.
- Main, I. (2013). “BBM NAIK” DAMPAK PEMOTONGAN SUBSIDI BBM TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA. In *Journal of Chemical Information and Modeling*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Misdawita, & Sari, A. A. P. S. (2013). Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengeluaran Subsidi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4, 147–161.
- Syaharul, Y. (2015). Jumlah Penduduk Miskin Bertambah Akibat Kenaikan Harga Pangan. *Katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/berita/2015/09/16/jumlah-penduduk-miskin-bertambah-akibat-kenaikan-harga-pangan>
- Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2018). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), 27–31. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.42>
- Mukomoko, J.A. (1993). *Dasar Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Renner, Sebastian dkk. (2015). *Proverty And Distributional Impacts Of Energy Subsidy Reform In Indonesia*. Italy: University of Venice
- Apriyanto, T. (2008). Kerangka Evaluasi Pengembangan Terminal Bus Antar Kota. *Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan*, 5(2), 85-92.
- Srihadi, Endang. (2005). Evaluasi Rencana Kebijakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak. *Jurnal The Indonesian Institute, Policy Assessment*. 8-14.
- Sasana, Hadi. (2018). The Impact of Fossil Energy Subsidies on Social Cost in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 8(2), 168-173
- Widowati. (2009). *Kompetensi Bidang Teknologi Pembelajaran dalam Mendukung Kerja*

Profesional Guru. Seminar Nasional Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan & Sertifikasi Tenaga Kependidikan. Hal: 193-199. Semarang: FT Unnes.

Mufliha, Nurul Mudhiatil. (2018). Pengaruh Penyaluran Dana Zis, Belanja Bantuan Sosial, Dan Belanja Subsidi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2013-2017. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 13-

Brown, D. (2005). Planning a Green Campus. Environmental Design and Construction. <http://www.edcmag.com>